

Indonesia Darurat Putus Sekolah: Siapa yang Bersalah?



Riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa partisipasi sekolah masyarakat Indonesia semakin menurun seiring meningkatnya kelompok usia. | foto: unicef.org

KETIK UNPAD – Keinginan Indonesia untuk berkompetisi di era inovasi, teknologi, dan globalisasi, serta mampu berdiri setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia, bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Untuk membangun SDM yang berkualitas, Indonesia memasukkan pendidikan menjadi salah satu dari tujuh agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024. SDM yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan ini adalah generasi yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dalam mewujudkan cita-cita ini, seluruh masyarakat yang memasuki rentang usia sekolah (7-24 tahun) harus aktif melakukan kegiatan bersekolah tanpa terkecuali.

Indonesia menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menggambarkan kemampuan sistem pendidikan menyerap penduduk usia sekolah. Dalam riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS): Statistik Pendidikan 2020, mengungkapkan, semakin meningkatnya kelompok usia, partisipasi sekolahnya semakin menurun.

Pada kelompok usia 7-15 tahun, lebih dari 90%-nya sekolah, kelompok usia 16-18, sebanyak 72%, dan kelompok usia 19-24 tahun sebanyak 25,26%. Artinya, mendapatkan Pendidikan tinggi di Indonesia adalah suatu privilese.

Faktor-faktor Masyarakat Indonesia Putus Sekolah

Faktor yang mempengaruhi penurunan angka partisipasi sekolah adalah biaya pendidikan yang tinggi, jumlah perguruan tinggi di desa yang sedikit, dan faktor ekonomi yang mendorong seseorang untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Kondisi ekonomi yang menghambat penduduk mendapatkan pendidikan juga terbukti dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), terjadi ketimpangan pendidikan antara rumah tangga yang berpenghasilan rendah dengan rumah tangga yang berpenghasilan tinggi pada kelompok usia 19-24 tahun. Pada status ekonomi terendah (kuintil 1) angka partisipasi sekolah hanya sebesar 13,38%, sedangkan pada status ekonomi tertinggi (kuintil 5), angka partisipasinya mencapai 45,89%.

Di Indonesia semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi juga angka putus sekolahnya. Di tahun 2020, 1 dari 1.000 penduduk putus sekolah di jenjang SD, 10 dari 1.000 di jenjang SMP, dan 11 dari 1.000 di jenjang SMA/SMK.

Salah satu faktor yang mempertinggi risiko penduduk putus sekolah adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit juga jumlah sekolah yang tersedia. Sehingga banyak penduduk yang harus bersaing satu sama lain. Pada tahun ajaran 2019/2020, jenjang SD memiliki 149.435 sekolah, SMP memiliki 40.559 sekolah, SMK memiliki 14.301 sekolah, dan jenjang SMA hanya memiliki 13.939 sekolah.

Tantangan lain juga ada pada Angka Tidak Sekolah (ATS), di mana jumlah penduduk yang tidak dapat bersekolah di desa lebih tinggi daripada yang di kota. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi rumah tangga di desa yang memiliki kecenderungan lebih miskin dan lebih sedikitnya akses terhadap pendidikan.***
(Penulis: Raisa Adzraa)

#sekolah #riset #unpad #Indonesia #pembangunan

